

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat sejak akhir tahun 1990-an telah menempatkan Indonesia di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2040. Meskipun pertumbuhan ini telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan menempatkan Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertambangan, manufaktur, dan industri yang menghasilkan banyak emisi. Indonesia kini menghadapi tantangan yang kompleks; mengatasi perubahan iklim dan beradaptasi dengan ekonomi global yang dengan cepat beralih dari bahan bakar fosil—tanpa melupakan tujuan pembangunannya.

Perubahan iklim menimbulkan risiko yang signifikan bagi Indonesia, dengan meningkatnya banjir, angin topan, dan panas yang ekstrem yang telah mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian di seluruh nusantara. Sektor-sektor penting seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat berisiko, dan Bank Dunia memperkirakan dampak iklim ini dapat merugikan Indonesia hingga 7% dari PDB pada tahun 2100.

Dekarbonisasi sangat penting—tidak hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Sebagai pengekspor batubara termal terbesar di dunia, Indonesia sangat perlu melakukan diversifikasi ekonomi seiring dengan menurunnya permintaan bahan bakar fosil.

Menyadari hal ini, pemerintah telah menetapkan target iklim yang ambisius—termasuk mengurangi emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 tanpa syarat, dan 42,20% dengan dukungan internasional, serta menghentikan secara bertahap penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040, dan mencapai titik nol pada tahun 2060. Pencapaian target-target ini dapat mengubah Indonesia menjadi pemimpin global dalam bidang energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, serta membuka peluang ekonomi yang sangat besar.

Namun, kesuksesan tidak hanya bergantung pada pencapaian target emisi. Transisi yang adil harus

berfokus pada manusia—tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi pekerja bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung semua rumah tangga, pekerja, dan wilayah yang terdampak, mulai dari mereka yang terpaksa pindah akibat penambangan mineral kritis hingga petani dan nelayan yang menghadapi dampak deforestasi dan polusi.

Laporan ini menguraikan tiga prinsip utama untuk memandu transisi yang adil di Indonesia:

1. Memberikan suara dan akses pilihan bagi mereka yang terdampak oleh transisi;
2. Memastikan mereka yang rentan tidak menjadi lebih buruk;
3. Memastikan manfaat dan biaya transisi dibagi secara adil.

Kerangka kerja ini akan mendukung pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memastikan transisi yang adil, inklusif, dan efektif. Transformasi ekonomi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat bagi kelompok rentan dan distribusi manfaat yang adil. Memberdayakan masyarakat bersuara dalam perencanaan transisi akan krusial untuk membangun kepercayaan publik, mempertahankan kohesi sosial, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Indonesia kini perlu menetapkan visi nasional yang jelas untuk transisi energi yang adil dan efektif—didukung oleh peta jalan kebijakan yang rinci untuk membimbing pengambilan keputusan, koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintah, dan keterlibatan yang bermakna dengan semua pemangku kepentingan. Badan koordinasi nasional diperlukan untuk mengarahkan upaya ini dan memastikan mereka berjalan ke arah yang benar. Mitra internasional juga memiliki peran penting, terutama dalam mendukung pengembangan rencana konsultasi komunitas dan penilaian tenaga kerja.

Indonesia memiliki sumber daya, ambisi, dan relevansi global untuk memimpin. Jika dilakukan dengan benar, transisi energi dapat meningkatkan standar hidup, memperkuat ekonomi, dan menunjukkan kepada dunia bagaimana peralihan yang adil dan inklusif menuju *net zero* dapat dilakukan.